

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang 22 Maret 2022

**Yayah Heriyah**  
NIM. 171120165

## ABSTRAK

**Nama: Yayah Heriyah, NIM 171120165 Judul Skripsi: *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional ASEAN China Free Trade Area (ACFTA)***

Asean China Free Trade Area (ACFTA) adalah sebuah perjanjian perdagangan internasional atau perdagangan bebas antara Negara ASEAN dengan China. Perjanjian tersebut dibuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membuka kawasan bebas pasar dengan melakukan penurunan tarif bea masuk hingga 0%. ACFTA diratifikasi pada tahun 2004 melalui keputusan Presiden, yang tidak melibatkan DPR di mana aturan hukum tersebut tidak sesuai dengan UUD Tahun 1945. Selain itu, ACFTA menurut beberapa peneliti, kebijakannya merugikan kepentingan nasional, seperti merugikan industri dan perikanan di Indonesia, dengan melakukan eksploitasi dan liberalisasi, sehingga banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Salah satu alasan tersebutlah yang melatar belakangi pengajuan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 mengenai aturan hukum yang berlaku, yang menguji pasal 2, pasal 9 (2), pasal 10, dan pasal 11 (1) UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan rumusan masalah, 1). Bagaimana problematika hukum pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018?. 2) Bagaimana hukum nasional mengatur keterlibatan DPR dalam perjanjian internasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018? 3). Bagaimana respon Negara terhadap perdagangan internasional ACFTA di Indonesia yang tidak diratifikasi oleh DPR, apakah sesuai dengan progresivitas hukum dan prinsip kedaulatan rakyat?

Penelitian ini bertujuan untuk, 1) Untuk mengetahui problematika hukum Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 yang tidak sesuai dengan Pasal 11 UUD Tahun 1945 yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. 2) Untuk menjawab pengaturan hukum Indonesia terhadap keterlibatan DPR dalam perjanjian internasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 termasuk terkait perdagangan internasional ACFTA. 3). Untuk dapat mengetahui peran Negara dalam menyikapi perdagangan internasional ACFTA sebagai wujud dalam mencapai progresivitas hukum serta pembangunan hukum dan ekonomi di bidang perdagangan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (studi pustaka) dengan metode pendekatan yuridis normatif (perundang-undangan). Sumber hukum penelitian ini adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1). Jenis dan kriteria perjanjian internasional yang harus disetujui DPR yang disebutkan dalam pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000, di mana kriteria perdagangan dan investasi yang dinilai berdampak luas bagi masyarakat dan berkaitan dengan keuangan Negara tidak masuk dalam ketentuan pasal tersebut, sehingga beberapa perjanjian perdagangan internasional diratifikasi bukan oleh DPR termasuk Perjanjian ACFTA. 2). Berdasarkan pengujian yang dilakukan MK, Pasal 10 UU Perjanjian Internasional dianggap inkonstitusional yang bertentangan dengan Pasal 11 UUD 1945. Sehingga membutuhkan perubahan hukum yang sesuai dengan konstitusi Negara. 3). Berdasarkan analisis mengenai perdagangan ACFTA termasuk pemparan dari organisasi KIARA di Indonesia, dinilai bahwa banyak kebijakannya yang merugikan kepentingan nasional, sehingga tidak sesuai dengan progresivitas hukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan) serta prinsip kedaulatan rakyat. Sehingga pemerintah membuat kebijakan sebagai upaya menghadapi ACFTA.

Kata Kunci : Perjanjian Internasional, Perdagangan ACFTA, Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

|       |                              |                               |
|-------|------------------------------|-------------------------------|
| Nomor | : <b>Nota Dinas</b>          | Kepada Yth                    |
| Lamp  | : 1 (satu) Eksemplar         | Bapak Dekan Fakultas Syari'ah |
| Hal   | : <b>Pengajuan Munaqasah</b> | UIN SMH Banten                |
|       | <b>a.n. Yayah Heriyah</b>    | Di Serang                     |
|       | <b>NIM : 171120165</b>       |                               |

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari, **Yayah Heriyah** NIM : 171120165, yang berjudul : ***"Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional ASEAN China Free Trade Area (ACFTA)"*** kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 22 Maret 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum.**  
NIP. 195908101990031002

**Eka Julaiha, S. Ag, M. A.**  
NIP. 197003162000032003

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 13/PUU-XVI/2018 TERHADAP  
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN  
INTERNASIONAL ASEAN CHINA FREE TRADE  
AREA (ACFTA)**

Oleh:

**Yayah Heriyah**  
NIM: 171120165

Menyetujui

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum.**  
NIP. 195908101990031002

Pembimbing II



**Eka Julaiha, S. Ag, M. A.**  
NIP. 197003162000032003

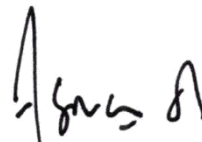
Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S. H., M. Si**  
NIP. 196506071992031005

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara



**Atu Karomah, S.H., M. Si**  
NIP. 19760623 200604 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi a.n **Yayah Heriyah** NIM : 171120165, yang berjudul : *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional ASEAN China Free Trade Area (ACFTA)”* telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syaria’ah Universitas Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 22 Maret 2022.

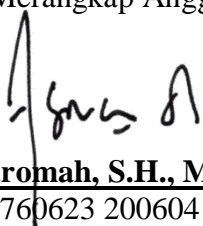
Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Strata Satu (SI) pada Fakultas syari’ah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas “Sultan Maulana Hasanudin” Banten.

Serang, 22 Maret 2022

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



**Atu Karomah, S.H., M. Si**  
NIP. 19760623 200604 1 002

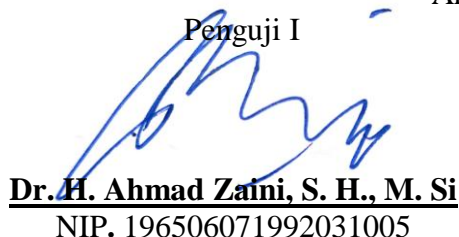


**David Nugraha Saputra, M.H**  
NIP. 198712162019031005

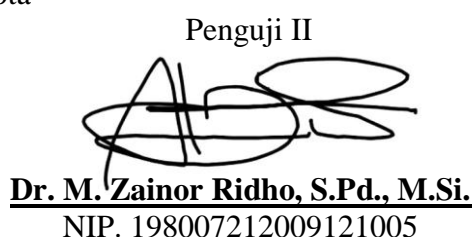
Penguji I

Anggota

Penguji II



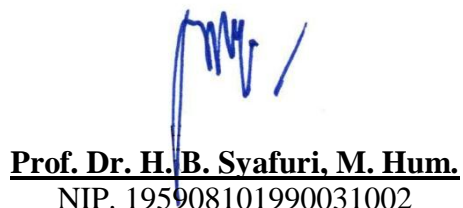
**Dr. H. Ahmad Zaini, S. H., M. Si**  
NIP. 196506071992031005



**Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si.**  
NIP. 198007212009121005

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum.**  
NIP. 195908101990031002



**Eka Julaiha, S. Ag, M. A.**  
NIP. 197003162000032003

## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan ridhonya, dengan usaha dan doa akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini sebagai tugas akhir (skripsi) perkuliahan untuk dapat memperoleh gelar sarjana.

Skripsi penulis dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, yang tersayang Bapak Khaerudin S. Pd. I, dan Mamah Rosyidah (Alm), yang telah membimbing dengan sabar, mencintai dan memberikan dukungan penuh kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah (skripsi), semoga senantiasa selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT.

Kepada Adik perempuan, Khofifatu Safira, sebagai adik satu-satunya yang dimiliki penulis, yang telah memberikan pengertian dan dukungan kepada penulis dengan canda tawanya yang menghibur. Semoga tumbuh menjadi adik yang penuh kasih dan sayang.

## MOTTO

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ

*“Menghindari sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan  
atas sesuatu yang mendatangkan manfaat”*

*Salus Populi Suprema Lex*

*“Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang  
tertinggi dalam suatu Negara”.*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis Yayah Heriyah dilahirkan di Serang pada 14 Oktober 1997, anak sulung dari 2 (dua) bersaudara, dari orang tua Bapak Khaerudin S.Pd.I dan Mamah Rosyidah (Alm)

Pendidikan formal yang telah diselesaikan di Sekolah Dasar Negeri Cikentang tahun 2010, SMP Negeri 12 Kota Serang tahun 2013, SMA Negeri 3 Kota Serang pada tahun 2016.

Penulis melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2017 dengan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten.

Penulis pernah mengikuti LK 1 Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat UIN SMH Banten, juga aktif di organisasi intra kampus yaitu Himpunan Jurusan Hukum Tata Negara, menjadi sekretaris Bidang PAO pada Tahun akademik 2018/2019. Serta turut ikut serta dalam pembentukan Law Community Fakultas Syariah UIN Banten.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat berserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas izin dan pertolongan dari Allah SWT, serta usaha yang sungguh-sungguh, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul: *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional ASEAN China Free Trade Area (ACFTA)”* yang merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi selesai dimunaqasyahkan pada tanggal 01 April 2022.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Ibu Atu Karomah, S.H. M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Arif Rahman, S.H., M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum., Pembimbing I dan Ibu Eka Julaiha S. Ag. M.A., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
6. Keluarga besar Kakek Radi, Nenek Alimah, dan Kakek Abdul Jamil, paman dan bibi, sepupu yang telah memberikan dukungan secara penuh dan perhatiannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik,

semoga kebahagiaan dan kebekahan selalu menyertai kalian semua.

7. Teman Seperjuangan Keluarga Besar HTN- D Angkatan 2017, penulis mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan kerja baiknya untuk saling memberi dukungan satu sama lain, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari smeua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 22 Maret 2022

**Yayah Heriyah**  
NIM. 171120165

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....   | i    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                       | ii   |
| <b>NOTA DINAS</b> .....                    | iii  |
| <b>PERSETUJUAN</b> .....                   | iv   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....                    | v    |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                   | vi   |
| <b>MOTTO</b> .....                         | vii  |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....                 | viii |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                | ix   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                    | xii  |
| <br>                                       |      |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN</b> .....         | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....            | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                    | 11   |
| C. Fokus Penelitian.....                   | 12   |
| D. Tujuan Penelitian .....                 | 13   |
| E. Manfaat Penelitian .....                | 14   |
| F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan ..... | 18   |
| G. Kerangka Pemikiran .....                | 22   |
| H. Metode Penelitian .....                 | 30   |
| I. Sistematika Pembahasan.....             | 34   |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| <b>BAB II</b>  | <b>TINJAUAN TEORI PERJANJIAN INTERNASIONAL, PERAN DPR DAN PEMERINTAH DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL, PRINSIP NEGARA HUKUM DAN KEDAULATAN RAKYAT, ATURAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....</b> | <b>37</b> |
|                | A. Perjanjian Internasional .....  | 37        |
|                | B. Peran Pemerintah dan DPR dalam Perjanjian Internasional.....  | 54        |
|                | C. Prinsip Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat .....  | 59        |
|                | D. Aturan Pembentukan Hukum dan Perundang-undangan di Indonesia .....  | 72        |
| <b>BAB III</b> | <b>PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL, PERDAGANGAN ACFTA, LANDASAN HUKUM ACFTA, IMPLIKASI ACFTA DI INDONESIA, DAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....</b>   | <b>76</b> |
|                | A. Perjanjian Perdagangan Internasional.....   | 76        |
|                | B. Perdagangan Internasional ACFTA (ASEAN China Free Trade Area) .....   | 83        |
|                | C. Implementasi dan Implikasi Perjanjian Perdagangan Internasional ACFTA (ASEAN China Free Trade Area) .....   | 103       |
|                | D. Mahkamah Konstitusi .....   | 121       |

|               |   |            |
|---------------|---|------------|
| <b>BAB IV</b> | <b>PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b>              |            |
|               | <b>PERKARA NOMOR 13/PUU-XVI/2018</b>            |            |
|               | <b>TERHADAP KEWENANGAN PERWAKILAN</b>           |            |
|               | <b>RAKYAT DALAM PERJANJIAN</b>                  |            |
|               | <b>PERDAGANGAN INTERNASIONAL ASEAN</b>          |            |
|               | <b>CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA).....</b>       | <b>136</b> |
|               | A. Problematika Hukum dalam Judicial Review     |            |
|               | Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara    |            |
|               | Nomor 13/PUU-XVI/2018 Terhadap Kewenangan       |            |
|               | DPR Dalam Perdagangan Internasional ACFTA ....  | 136        |
|               | B. Kewenangan DPR dalam Perjanjian Perdagangan  |            |
|               | Internasional Berdasarkan Hukum Nasional dan    |            |
|               | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-       |            |
|               | XVI/2018 Tentang Perjanjian Internasional ..... | 155        |
|               | C. Respon Negara Terhadap Perdagangan ACFTA     |            |
|               | (ASEAN China Free Trade Area) Yang Tidak        |            |
|               | Diratifikasi oleh DPR.....                      | 176        |
| <b>BAB V</b>  | <b>PENUTUP</b> .....                            | <b>192</b> |
|               | A. Kesimpulan .....                             | 192        |
|               | B. Saran .....                                  | 195        |
|               | <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                           |            |
|               | <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                        |            |